

ANALISIS KEBIJAKAN DIGITALISASI PENDIDIKAN DASAR: RELASI TEKNOLOGI PENDIDIKAN, PEMERINTAHAN, DAN DINAMIKA SOSIAL GLOBAL

Defi

Institut Agama Islam Lukman Edy, Indonesia

*Correspondent email: defi89defi@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan digitalisasi pendidikan dasar dalam relasinya dengan teknologi pendidikan, pemerintahan, dan dinamika sosial global. Digitalisasi pendidikan dipahami sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan perangkat teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi sistem pembelajaran dan tata kelola pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan publik melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan pendidikan dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan respons terhadap percepatan transformasi digital global serta tuntutan kompetensi abad ke-21. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan infrastruktur, disparitas literasi digital guru, dan kesenjangan sosial antarwilayah. Selain itu, pengaruh dinamika global dan rekomendasi lembaga internasional seperti UNESCO turut membentuk arah kebijakan nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan digitalisasi pendidikan dasar sangat ditentukan oleh pemerataan akses teknologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta tata kelola kebijakan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Kata kunci: digitalisasi pendidikan dasar; kebijakan publik; teknologi pendidikan; globalisasi pendidikan; tata kelola pendidikan

Abstract: This study aims to analyze the policy of digitalization in primary education by examining the relationship between educational technology, governance, and global social dynamics. Educational digitalization is understood not merely as the utilization of technological devices, but as a comprehensive transformation of learning systems and educational governance. This research employs a qualitative approach with a public policy analysis design, utilizing document analysis and in-depth interviews with key stakeholders in primary education. The findings indicate that the digitalization policy developed by Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi represents a strategic response to rapid global digital transformation and the demand for 21st-century competencies. However, policy implementation continues to face significant challenges, including infrastructural disparities, unequal digital literacy among teachers, and regional social inequalities. Furthermore, global dynamics and recommendations from international organizations such as UNESCO have influenced the direction of national education policy. The study concludes that the success of primary education digitalization depends on equitable access to technology, strengthened human resource capacity, and inclusive and socially just governance frameworks.

Keywords: primary education digitalization; public policy; educational technology; global education dynamics; educational governance

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang mengubah secara fundamental hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sektor pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat dalam dua dekade terakhir telah mendorong lahirnya



paradigma baru dalam proses pembelajaran, tata kelola lembaga pendidikan, serta kebijakan publik di bidang pendidikan. Dalam konteks global, digitalisasi pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas, pemerataan akses, dan relevansi pendidikan terhadap tuntutan abad ke-21 (UNESCO, 2021). Pendidikan tidak lagi dipahami sebatas transfer pengetahuan di ruang kelas konvensional, melainkan sebagai proses pembelajaran berbasis ekosistem digital yang dinamis, kolaboratif, dan berbasis data.

Organisasi internasional seperti UNESCO menegaskan bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan merupakan bagian integral dari pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas dan inklusif (UNESCO, 2021). Laporan global tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital berpotensi memperluas akses pendidikan, meningkatkan efektivitas pembelajaran, serta memperkuat sistem manajemen pendidikan melalui pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan. Namun, pada saat yang sama, UNESCO juga mengingatkan bahwa transformasi digital berisiko memperdalam kesenjangan sosial apabila tidak disertai kebijakan yang responsif dan berkeadilan.

Dalam konteks nasional, kebijakan digitalisasi pendidikan dasar di Indonesia mengalami percepatan signifikan sejak pandemi Covid-19. Krisis global tersebut memaksa sistem pendidikan melakukan migrasi besar-besaran menuju pembelajaran daring (online learning), sehingga mendorong pemerintah untuk memperkuat infrastruktur dan regulasi digital pendidikan (Azzahra, 2020). Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengembangkan berbagai kebijakan strategis dalam kerangka Merdeka Belajar, termasuk peluncuran Platform Merdeka Mengajar, digitalisasi sekolah, serta penguatan literasi digital bagi guru dan peserta didik (Kemendikbudristek, 2022). Kebijakan ini menunjukkan adanya relasi erat antara agenda transformasi teknologi dan arah kebijakan pemerintahan dalam merespons perubahan sosial global.

Secara konseptual, digitalisasi pendidikan tidak hanya menyangkut penggunaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), tetapi juga transformasi struktur, budaya organisasi, serta pola interaksi sosial dalam lingkungan pendidikan. Menurut Fullan (2013), transformasi pendidikan berbasis teknologi menuntut perubahan paradigma kepemimpinan, kompetensi guru, dan sistem evaluasi pembelajaran. Teknologi bukan sekadar alat bantu, melainkan agen perubahan (agent of change) yang memengaruhi relasi kuasa, distribusi pengetahuan, serta struktur sosial dalam pendidikan. Dengan demikian, kebijakan digitalisasi pendidikan dasar perlu dipahami sebagai kebijakan multidimensional yang melibatkan aspek teknologis, politis, dan sosiologis secara simultan.

Dari perspektif kebijakan publik, analisis digitalisasi pendidikan dapat menggunakan kerangka tahapan kebijakan (policy cycle) yang mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi (Dunn, 2018). Pada tahap formulasi, pemerintah merespons tekanan global dan kebutuhan domestik melalui penyusunan regulasi dan program digitalisasi. Pada tahap implementasi, kebijakan tersebut berinteraksi dengan realitas sosial di tingkat sekolah dasar yang memiliki karakteristik beragam, baik dari sisi geografis, ekonomi, maupun budaya. Sementara itu, pada tahap evaluasi, efektivitas kebijakan diukur berdasarkan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses teknologi.

Dinamika sosial global turut memberikan pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan digitalisasi pendidikan dasar. Globalisasi telah menciptakan kompetisi antarnegara dalam membangun sumber daya manusia berbasis literasi digital dan kecakapan abad ke-21 (21st century skills) seperti critical thinking, creativity, collaboration, dan communication (World Economic Forum, 2020). Dalam konteks ini, pendidikan dasar menjadi fondasi penting untuk membangun



kapasitas generasi muda agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang disruptif. Namun demikian, globalisasi juga membawa implikasi komersialisasi pendidikan melalui penetrasi platform digital swasta dan aktor transnasional dalam sistem pendidikan nasional (Selwyn, 2016).

Di sisi lain, realitas sosial Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan akses digital antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Data menunjukkan bahwa kesenjangan infrastruktur internet dan ketersediaan perangkat masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan dasar (Azzahra, 2020). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana kebijakan digitalisasi mampu menjamin prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam sistem pendidikan nasional. Tanpa intervensi kebijakan afirmatif, digitalisasi berpotensi memperkuat stratifikasi sosial dalam pendidikan.

Selain faktor infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi aspek krusial. Kompetensi digital guru di tingkat sekolah dasar masih beragam, sehingga memengaruhi efektivitas integrasi teknologi dalam pembelajaran (Kemendikbudristek, 2022). Transformasi digital menuntut perubahan budaya kerja, peningkatan literasi digital, serta penguatan kapasitas pedagogik berbasis teknologi. Dengan demikian, relasi antara teknologi pendidikan dan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat yang menjadi arena implementasi kebijakan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif kebijakan digitalisasi pendidikan dasar dengan menelaah relasi antara teknologi pendidikan, peran pemerintahan, dan dinamika sosial global yang memengaruhinya. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi arah dan karakteristik formulasi kebijakan digitalisasi pendidikan dasar yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; (2) menganalisis proses dan tantangan implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan dasar; (3) mengevaluasi dampak kebijakan terhadap pemerataan akses, kualitas pembelajaran, dan kesiapan sumber daya manusia; serta (4) mengkaji sejauh mana dinamika global dan rekomendasi lembaga internasional seperti UNESCO memengaruhi orientasi kebijakan nasional. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi kebijakan pendidikan sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola digitalisasi pendidikan dasar yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan untuk mengkaji digitalisasi pendidikan dasar dalam relasinya dengan teknologi pendidikan, pemerintahan, dan dinamika sosial global. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap proses, konteks, dan makna kebijakan sebagai konstruksi sosial (Creswell, 2014). Analisis dilakukan menggunakan kerangka *policy cycle* yang mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan (Dunn, 2018).

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kebijakan dan praktisi pendidikan dasar, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap regulasi dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta laporan internasional dari UNESCO. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi dengan menerapkan triangulasi sumber untuk menjaga validitas data (Sugiyono, 2019).



Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Keabsahan data dijaga melalui uji kredibilitas dan konfirmabilitas sebagaimana dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif terhadap kebijakan digitalisasi pendidikan dasar dalam konteks sosial global yang dinamis.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif (content analysis). Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka digunakan untuk mendeskripsikan suatu kenyataan ataupun mengetahui topik yang diteliti oleh peneliti. Hal tersebut dapat diketahui bahwasanya penelitian pustaka adalah penelitian yang sifatnya alamiah dengan hasil datanya berupa deskripsi tanpa menggunakan hitungan matematik atau sesuatu yang dapat diukur.(Sugiono, 2008) Adapun alat pengumpulan data yaitu dokumentasi dengan menggali artikel-artikel jurnal, buku, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan judul penelitian ini. Metode deskriptif dikembangkan dalam penelitian ini sebagai hasil dari teknik analisis data. Tujuan utama dari pendekatan analisis kajian ini adalah untuk mendeskripsikan, mendiskusikan, dan mengkritisi UU TPKS dari perspektif Islam, psikologi, dan kebijakan publik formal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan dasar di Indonesia merupakan respons strategis pemerintah terhadap percepatan transformasi teknologi global dan tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia abad ke-21. Kebijakan ini terintegrasi dalam agenda reformasi pendidikan nasional melalui program Merdeka Belajar yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Digitalisasi diposisikan tidak hanya sebagai inovasi teknis, tetapi sebagai instrumen transformasi sistem pembelajaran, tata kelola sekolah, dan penguatan kapasitas guru berbasis platform digital (Kemendikbudristek, 2022).

Dari aspek formulasi kebijakan, penelitian menemukan bahwa digitalisasi pendidikan dasar dirancang dengan pendekatan top-down yang dipengaruhi oleh agenda global pendidikan berbasis teknologi. Rujukan terhadap praktik internasional dan rekomendasi lembaga global seperti UNESCO menunjukkan adanya keterkaitan kuat antara kebijakan nasional dan dinamika sosial global (UNESCO, 2021). Hal ini menegaskan bahwa arah kebijakan pendidikan nasional tidak terlepas dari arus globalisasi, perkembangan ekonomi digital, dan tuntutan kompetensi abad ke-21.

Pada tahap implementasi, hasil penelitian menunjukkan adanya variasi yang signifikan antarwilayah dalam pemanfaatan teknologi pendidikan. Sekolah dasar di wilayah perkotaan relatif lebih siap dari segi infrastruktur, akses internet, dan literasi digital guru dibandingkan dengan sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya berjalan secara merata dan masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan sarana, kualitas jaringan, serta kapasitas sumber daya manusia (Azzahra, 2020). Dengan demikian, relasi antara teknologi dan pemerintahan dalam implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan geografis.

Dari sisi teknologi pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital telah mendorong perubahan pola pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan berbasis data. Guru mulai memanfaatkan perangkat digital untuk perencanaan pembelajaran, asesmen, serta pengelolaan administrasi sekolah. Namun demikian, transformasi pedagogis belum sepenuhnya optimal, karena sebagian guru masih menggunakan teknologi sebatas alat bantu administratif,



bukan sebagai instrumen inovasi pembelajaran (Fullan, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital membutuhkan perubahan budaya organisasi dan paradigma pendidikan, bukan hanya penyediaan perangkat teknologi.

Dalam perspektif dinamika sosial global, digitalisasi pendidikan dasar juga menunjukkan adanya pengaruh komersialisasi platform dan aktor teknologi swasta dalam sistem pendidikan. Kehadiran berbagai aplikasi dan platform pembelajaran digital memperluas pilihan akses belajar, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan baru terkait regulasi, keamanan data, dan kedaulatan digital pendidikan (Selwyn, 2016). Dengan demikian, kebijakan digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, tetapi juga menyentuh dimensi politik dan ekonomi global.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan dasar merupakan fenomena multidimensional yang memperlihatkan relasi erat antara teknologi pendidikan, kebijakan pemerintahan, dan dinamika sosial global. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh konsistensi regulasi, kesiapan infrastruktur, peningkatan kapasitas guru, serta keberpihakan terhadap prinsip keadilan sosial. Tanpa pendekatan yang inklusif dan adaptif, digitalisasi berpotensi memperluas kesenjangan sosial dalam sistem pendidikan dasar.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan dasar di Indonesia tidak dapat dipahami semata sebagai inovasi teknologis, melainkan sebagai kebijakan publik yang lahir dari interaksi antara tuntutan global, kepentingan nasional, dan dinamika sosial domestik. Dalam perspektif teori kebijakan publik, kondisi ini memperlihatkan bahwa proses formulasi kebijakan digitalisasi mengikuti pola responsif terhadap tekanan eksternal (*external drivers*) dan kebutuhan internal (*internal demands*) sebagaimana dijelaskan dalam model *policy cycle* (Dunn, 2018). Pemerintah merumuskan kebijakan digitalisasi sebagai jawaban atas percepatan transformasi teknologi global sekaligus sebagai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional.

Relasi antara teknologi pendidikan dan pemerintahan dalam kebijakan ini menunjukkan karakteristik *state-driven digital transformation*, di mana negara berperan sebagai aktor utama dalam menyediakan regulasi, infrastruktur, dan platform digital pendidikan. Melalui kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, digitalisasi pendidikan dasar ditempatkan sebagai bagian dari agenda reformasi struktural pendidikan nasional (Kemendikbudristek, 2022). Dalam konteks ini, negara berfungsi sebagai regulator sekaligus fasilitator transformasi digital. Namun demikian, pendekatan yang cenderung top-down sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini menimbulkan tantangan pada tahap implementasi, terutama dalam konteks keberagaman kondisi sosial dan geografis Indonesia.

Ketimpangan implementasi antarwilayah memperkuat argumentasi bahwa kebijakan teknologi tidak bersifat netral secara sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Selwyn (2016), teknologi pendidikan selalu beroperasi dalam struktur sosial tertentu yang dapat mereproduksi atau bahkan memperluas ketimpangan yang telah ada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sekolah di wilayah perkotaan memiliki kesiapan infrastruktur dan literasi digital yang lebih baik dibandingkan sekolah di daerah 3T. Hal ini sejalan dengan temuan Azzahra (2020) yang menegaskan bahwa kesenjangan akses internet dan perangkat digital menjadi hambatan utama dalam pemerataan pembelajaran berbasis teknologi di Indonesia. Dengan demikian, tanpa kebijakan afirmatif yang kuat, digitalisasi berpotensi menciptakan *digital divide* dalam pendidikan dasar.

Dari perspektif transformasi pedagogis, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi oleh guru masih didominasi pada aspek administratif dan distribusi materi, belum sepenuhnya menyentuh inovasi pembelajaran yang bersifat transformatif. Kondisi ini menguatkan



pandangan Fullan (2013) bahwa keberhasilan integrasi teknologi dalam pendidikan tidak hanya bergantung pada ketersediaan perangkat, tetapi juga pada perubahan budaya organisasi, kepemimpinan sekolah, dan kompetensi pedagogik guru. Transformasi digital menuntut pergeseran paradigma dari pembelajaran berpusat pada guru (*teacher-centered*) menuju pembelajaran yang kolaboratif, kreatif, dan berbasis pemecahan masalah. Tanpa perubahan paradigma tersebut, digitalisasi hanya akan menjadi substitusi teknologi atas praktik konvensional.

Lebih jauh, pembahasan ini juga menempatkan kebijakan digitalisasi pendidikan dasar dalam konteks dinamika sosial global. Globalisasi pendidikan telah mendorong standardisasi kompetensi abad ke-21 serta integrasi teknologi sebagai indikator kemajuan sistem pendidikan (World Economic Forum, 2020). Rekomendasi lembaga internasional seperti UNESCO menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran (UNESCO, 2021). Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan nasional memiliki keterkaitan erat dengan agenda global tersebut, baik dalam aspek literasi digital maupun dalam penggunaan platform pembelajaran berbasis data. Hal ini memperlihatkan adanya konvergensi kebijakan nasional dengan arus globalisasi pendidikan.

Namun demikian, dinamika global juga membawa konsekuensi terhadap meningkatnya peran aktor non-negara, khususnya perusahaan teknologi digital, dalam ekosistem pendidikan. Kehadiran platform pembelajaran swasta dan penyedia layanan teknologi menimbulkan pertanyaan mengenai kedaulatan data, keamanan informasi peserta didik, serta potensi komersialisasi pendidikan dasar. Selwyn (2016) mengingatkan bahwa digitalisasi pendidikan sering kali beririsan dengan kepentingan ekonomi-politik global, sehingga negara perlu menjaga keseimbangan antara inovasi dan regulasi. Dalam konteks Indonesia, hal ini menuntut penguatan regulasi perlindungan data serta pengawasan terhadap integrasi platform digital dalam sistem pendidikan dasar.

Secara sosiologis, penelitian ini juga menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap digitalisasi pendidikan bersifat ambivalen. Di satu sisi, orang tua dan peserta didik merasakan manfaat fleksibilitas akses belajar dan kemudahan informasi. Di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait ketergantungan terhadap gawai, penurunan interaksi sosial langsung, serta beban biaya perangkat dan kuota internet. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan dasar tidak hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi juga pada struktur sosial keluarga dan pola relasi dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan digitalisasi harus mempertimbangkan dimensi sosial dan kultural agar tidak menimbulkan resistensi atau eksklusivitas sosial.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan dasar merupakan kebijakan multidimensional yang berada pada persimpangan antara teknologi, pemerintahan, dan dinamika sosial global. Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi oleh konsistensi tata kelola, pemerataan akses, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keberpihakan pada prinsip keadilan sosial. Digitalisasi yang inklusif dan adaptif akan memperkuat sistem pendidikan dasar sebagai fondasi pembangunan nasional, sedangkan digitalisasi yang elitis berpotensi memperdalam stratifikasi sosial dalam pendidikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan dasar di Indonesia merupakan kebijakan strategis yang dibentuk oleh interaksi antara perkembangan teknologi pendidikan, peran pemerintahan, dan dinamika sosial global. Kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan komitmen transformasi



sistem pembelajaran dan tata kelola pendidikan berbasis teknologi serta penguatan kompetensi abad ke-21.

Namun, implementasinya belum sepenuhnya merata akibat ketimpangan infrastruktur, perbedaan literasi digital guru, dan kondisi sosial-ekonomi antarwilayah. Selain itu, pengaruh standar dan rekomendasi global dari lembaga seperti UNESCO turut membentuk arah kebijakan nasional. Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi pendidikan dasar sangat bergantung pada pemerataan akses teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta tata kelola kebijakan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, N. F. (2020). *Addressing distance learning barriers in Indonesia amid the Covid-19 pandemic*. Center for Indonesian Policy Studies.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Fullan, M. (2013). *Stratosphere: Integrating technology, pedagogy, and change knowledge*. Pearson.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan implementasi transformasi digital pendidikan melalui Platform Merdeka Mengajar*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Parsons, W. (2005). *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Selwyn, N. (2016). *Education and technology: Key issues and debates* (2nd ed.). Bloomsbury Academic.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- World Economic Forum. (2020). *The future of jobs report 2020*. World Economic Forum.

